

PENGEMBANGAN MASYARAKAT MUSLIM PESISIR KARANGANTU PADA MASA DESENTRALISAS

Yanwar Pribadi
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Makalah ini menganalisis pengembangan masyarakat Muslim pesisir di bekas pelabuhan utama Kesultanan Banten dengan studi kasus di Pelabuhan Karangantu, Kota Serang, Provinsi Banten pada masa desentralisasi (pasca Orde Baru). Fokus utama adalah bagaimana hubungan sosial-ekonomi-budaya antara pendatang, yaitu orang-orang Bugis, Lampung dan Cirebon dengan orang Banten dan dengan sesama mereka berperan dalam mengembangkan masyarakat pesisir tersebut. Makalah ini secara lebih luas menginvestigasi kebijakan pemerintah mengenai sektor kelautan dan perikanan pasca diterapkannya otonomi daerah sejak tahun 2000. Pokok-pokok permasalahan yang dibahas adalah latar belakang sejarah Banten sebagai pusat kekuasaan maritim terkemuka; kedatangan dan interaksi pedagang dan nelayan mancanegara dan Nusantara dengan masyarakat Banten; kebijakan desentralisasi; pola dan bentuk hubungan antaretnis di Banten; pengaruh serta dampak kebijakan desentralisasi terhadap perkembangan dunia maritim Banten; dan pengembangan masyarakat Muslim di daerah pesisir Banten utara. Analisis yang ditawarkan di makalah ini adalah bahwa di satu sisi, hubungan antaretnis di daerah pesisir Banten adalah hubungan sosial-ekonomi-budaya yang telah telah terjalin lama dan dapat dijadikan sebagai bentuk hubungan multikulturalisme yang ideal. Namun, di sisi lain kebijakan desentralisasi dan kebijakan pemerintah pusat dalam masalah kelautan dan perikanan belum mampu memberikan solusi yang tepat dalam meningkatkan kehidupan perekonomian

masyarakat nelayan Banten, seperti yang terjadi pada abad ke-16 dan 17. Tetapi, secara mandiri masyarakat nelayan di pesisir utara Banten telah lama mampu mengembangkan diri mereka sendiri, sekaligus berperan aktif dalam proses-proses pemberdayaan sosial-budaya mereka sendiri.

Kata kunci: Karangantu, Banten, Nelayan, Desentralisasi, Pengembangan masyarakat

Pendahuluan

Kesultanan Banten pernah menjadi pusat kekuasaan maritim terkemuka di Asia pada abad ke-16 dan 17. Kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Nusantara, dan hubungan diplomatiknya terjalin hingga ke Arab Saudi melalui permintaan gelar sultan. VOC bahkan mengalami kesulitan menguasai Banten hingga akhir abad ke-17.

Secara umum, Banten adalah kerajaan dengan budaya bahari yang kuat. Di sana terdapat beberapa pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan internasional. Di antaranya adalah Karangantu, Pontang dan Tanara. Ketiganya berhasil menarik perhatian pedagang dan nelayan mancanegara dan daerah-daerah lain di Nusantara. Pada masanya, Banten adalah salah satu daerah yang paling kosmopolis di Nusantara dengan kedatangan dan menetapnya pedagang, nelayan dan kelompok-kelompok profesi lainnya seperti orang-orang dari Tiongkok, India, Semenanjung Melayu, Jazirah Arab, Turki, Portugal, Belanda, Inggris, Prancis, dan daerah-daerah di Nusantara seperti orang-orang Bugis, Lampung, Madura, Ternate, Makassar, dan Cirebon.

Pasca kemerdekaan Indonesia, Banten mengalami kemunduran yang signifikan. Secara administratif Banten menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Daerah pedalaman Banten yang pada masa kesultanan adalah daerah tertinggal, pada masa kemerdekaan keadaannya tidak menjadi lebih baik. Lebak bahkan menjadi daerah

paling tertinggal di Jawa Barat. Keadaan di pesisir pun merefleksikan hal yang serupa. Karangantu, Pontang dan Tanara kehilangan reputasinya sebagai pelabuhan yang pernah memainkan peran penting dalam sistem pelayaran dan perdagangan Nusantara, dan sebagian besar masyarakat nelayannya hidup di lingkaran kemiskinan. Namun, ketiganya, terutama Karangantu, tetap memiliki peran penting sebagai pelabuhan perikanan di Banten. Masyarakat Karangantu tetap mempertahankan 'reputasinya' sebagai daerah kosmopolis yang tetap menarik perhatian nelayan dari daerah-daerah lain di Indonesia, terutama pada musim melaut. Selain itu, kelompok etnis Bugis, Lampung dan Cirebon bahkan memiliki perkampungan sendiri di sana dan hingga kini sebagian besar tetap mempertahankan budaya dan tradisinya masing-masing sambil berakulturasi dengan budaya dan tradisi Banten.

Makalah ini menganalisis pengembangan masyarakat Muslim pesisir di bekas pelabuhan utama Kesultanan Banten dengan studi kasus di Pelabuhan Karangantu, Kota Serang, Provinsi Banten pada masa desentralisasi (pasca Orde Baru). Fokus utama adalah bagaimana hubungan sosial-ekonomi-budaya antara pendatang, yaitu orang-orang Bugis, Lampung dan Cirebon dengan orang Banten dan dengan sesama mereka berperan dalam mengembangkan masyarakat pesisir tersebut. Makalah ini secara lebih luas menginvestigasi kebijakan pemerintah mengenai sektor kelautan dan perikanan pasca diterapkannya otonomi daerah sejak tahun 2000. Pokok-pokok permasalahan yang dibahas adalah latar belakang sejarah Banten sebagai pusat kekuasaan maritim terkemuka; kedatangan dan interaksi pedagang dan nelayan mancanegara dan Nusantara dengan masyarakat Banten; kebijakan desentralisasi; pola dan bentuk hubungan antaretnis di Banten; pengaruh serta dampak kebijakan desentralisasi terhadap perkembangan dunia maritim Banten; dan pengembangan masyarakat Muslim di daerah pesisir Banten utara. Analisis yang ditawarkan di makalah ini adalah bahwa di satu sisi, hubungan antaretnis di daerah pesisir Banten adalah hubungan sosial-ekonomi-budaya yang

telah telah terjalin lama dan dapat dijadikan sebagai bentuk hubungan multikulturalisme yang ideal. Namun, di sisi lain kebijakan desentralisasi dan kebijakan pemerintah pusat dalam masalah kelautan dan perikanan belum mampu memberikan solusi yang tepat dalam meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat nelayan Banten, seperti yang terjadi pada abad ke-16 dan 17. Tetapi, secara mandiri masyarakat nelayan di pesisir utara Banten telah lama mampu mengembangkan diri mereka sendiri, sekaligus berperan aktif dalam proses-proses pemberdayaan sosial-budaya mereka sendiri.

Banten sebagai pusat kekuasaan maritim terkemuka

Keresidenan Banten pada masa Orde Baru terdiri dari tiga kabupaten: Serang, Pandeglang dan Lebak. Secara umum, Banten memiliki dua karakteristik geografis yang berbeda. Bagian selatan ditandai dengan banyaknya dataran tinggi dan memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan bagian utara. Sementara itu, bagian utara memiliki dataran rendah yang luas dan jumlah penduduknya pun lebih banyak. Penduduk Banten yang utama berasal dari etnis Sunda yang menetap di bagian selatan, sedangkan etnis Jawa yang pada mulanya berasal dari Demak dan Cirebon kebanyakan menetap di bagian utara. Orang Kanekes atau Baduy¹, yang mengembangkan kebudayaan mereka sendiri, tinggal di pegunungan di bagian selatan.²

¹Untuk mengetahui kedudukan orang Baduy di antara masyarakat Jawa Barat lainnya, lihat Robert Wessing, "The Position of the Baduj in the Larger West Javanese Society", *Man*, New Series, Vol. 12, No. 2 (August 1977), h. 293-303.

²Sartono Kartodirdjo menunjukkan bahwa perbedaan antara Banten utara dan selatan harus dilihat dari unsur lingkungan, faktor ekologis, sekaligus perbedaan dalam asal-usul sosial-budaya dan asal-usul historis (Kartodirdjo, 1966: 30). Kedua kelompok etnis tersebut menunjukkan perbedaan dalam hal bahasa dan adat-istiadat. Sebagai contoh, bagi orang Belanda, orang Banten utara terkenal karena fanatisme religius mereka, sikap agresifnya, dan semangat memberontaknya. Selain itu, dalam melihat perbedaan dalam hal bahasa, Mikihiro Moriyama berpendapat bahwa kesadaran perbedaan dalam hal bahasa, budaya dan etnisitas tidak terindikasi di Jawa Barat sebelum abad ke-19. Pemerintah kolonial dan para sarjanalah yang memaksa orang Jawa Barat untuk mengidentifikasi diri mereka secara bersebrangan dengan orang Jawa dan orang Melayu (Moriyama dalam Atsushi, 2006: 174).

Secara umum, daerah pedalaman Banten lebih subur. Bagian utara, terutama daerah pesisir, memiliki karakter lanskap persawahan yang tidak teririgasi dengan baik, tingkat kegagalan panen yang tinggi, dan hampir tidak adanya tanaman lain selain sawah (Williams, 1990: 2-4). Namun, Sartono Kartodirdjo memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Ia mengatakan bahwa tanah persawahan yang paling teririgasi ditemukan di lereng gunung dan dataran di utara, dan oleh karena itu wilayah kekuasaan Sultan ditemukan di dataran utara. Sementara itu, daerah pegunungan dan perbukitan di selatan adalah daerah di mana budidaya padi kering dipraktikkan. Lebih jauh, ia menunjukkan bahwa daerah ini kering dan tidak teririgasi (Kartodirdjo, 1966: 31). Penjelasan terbaik mengenai adanya perbedaan antara pendapat Williams dan Kartodirdjo mengenai kesuburan daerah Banten terletak pada adanya perubahan bentuk persawahan yang sering berubah sepanjang waktu. Selain itu, juga menarik jika kita melihat pendapat Heriyanti O. Untoro yang menyebutkan bahwa ada perubahan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi tanah liat di Banten untuk pembuatan gerabah selama ratusan tahun (Untoro, 2006: 129).

Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1525³ memiliki teritori hingga ke daerah-daerah yang meliputi Jasinga, Tangerang dan Lampung. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Banten melakukan aktivitas perdagangan yang seimbang dengan orang asing dan membuat perjanjian dengan orang Portugis, Inggris dan Belanda. Banten adalah sebuah pelabuhan, kota perdagangan dan pusat pemerintahan sekaligus. Selain itu, ia adalah sebuah kota yang sangat sibuk. Kemunculan perdagangan lada dan komoditas lain berjalan beriringan dengan perkembangan Banten. Perdagangan lada dimonopoli oleh keluarga Sultan dan penguasa lainnya, dan oleh karena itu, sejumlah besar bangsawan bekerjasama dengan pedagang-pedagang asing. Perdagangan tersebut memberikan penghasilan

³Kartodirdjo mengatakan bahwa ia berdiri pada tahun 1520 (Kartodirdjo, 1966: 53), sedangkan Atsushi secara berhati-hati menyebutkan bahwa Kesultanan Banten berdiri antara tahun 1522 dan 1527 (Atsushi, 2006: 16).

utama bagi kesultanan. Sebagai tambahan, pajak dari ekspor barang dan bea pelabuhan juga berkontribusi secara signifikan bagi kemajuan Banten (Meilink-Roelofs, 1962: 76 & 392).

Barang-barang dagangan yang menjadi komoditas utama adalah bahan makanan berupa beras dan hasil bumi lainnya seperti sayur-mayur dan buah-buahan serta hasil ternak. Melalui perdagangan, keuntungan ekonomi yang diperoleh Banten bukan hanya berasal dari jual-beli semata. Barang yang masuk ke pelabuhan dikenakan bea cukai yang besarnya ditentukan oleh syahbandar. Sebagai gambaran, pada tahun 1608 Syahbandar Banten menarik bea cukai dan pajak terhadap Kapal "Banten" milik VOC yang akan mengekspor 8.440 karung lada sebesar fl 11.533 (Lubis, 2004: 78).

Namun, setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dunia, prestise Banten merosot tajam karena perebutan kekuasaan di antara keluarga Sultan yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk memperluas pengaruh mereka dalam mengintervensi kesultanan.⁴ Kesultanan yang besar tersebut akhirnya runtuh pada tahun 1808 ketika ia akhirnya berada di bawah kekuasaan Belanda di bawah perintah Gubernur Jenderal H.W. Daendels (1808-1811).⁵

Interaksi pedagang dan nelayan mancanegara dan Nusantara dengan orang Banten

Tomé Pires, seorang ahli obat-obatan dari Lisbon yang menghabiskan waktunya di Malaka dari tahun 1512 hingga 1515, mengunjungi Jawa dan Sumatera dan dengan sangat giat mengumpulkan informasi dari orang-orang

⁴Peristiwa tahun 1682 di mana Belanda mengirim pasukan ke Banten pada bulan Maret telah lama dianggap sebagai titik krusial dalam sejarah Banten karena hilangnya kemerdekaan diplomatik kesultanan dan basis kemakmuran ekonominya (Atsushi, 2006: 18 & Suharto, 2001: 5).

⁵Namun Williams berpendapat bahwa walaupun kesultanan dianeksasi oleh Belanda pada tahun 1808, mereka tetap mempertahankan sultan sebagai penguasa boneka hingga tahun 1832 (Williams, 1990: xxvii).

mengenai seluruh daerah Malaya-Indonesia. Menurut Pires, daerah Jawa Barat yang berbahasa Sunda belum menganut agama Islam, bahkan malah memusuhinya. Daerah tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda, termasuk Banten (Ricklefs, 2010: 11-12). Namun, Pires tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kondisi Banten saat itu sebagai sebuah pelabuhan yang berada di bawah Kerajaan Sunda.

Di sebagian besar wilayah luar Jawa, kerajaan-kerajaan terbentuk di daerah pantai yang cocok untuk pertanian padi. Namun, jalur komunikasi yang terpenting bagi negara-negara seperti itu menuju ke luar, ke arah laut. Hal itu pulalah yang membuat etnis Bugis dari Sulawesi Selatan memulai emigrasi besar-besaran pada abad ke-17 dan 18. Mereka tidak bergerak ke utara di dalam pulau mereka sendiri, tetapi justru memilih perahu untuk melakukan pelayaran. Bagi pulau-pulau luar Jawa, lautan adalah jalan raya mereka. Orang-orang Bugis ini memilih Banten sebagai salah satu wilayah tujuan emigrasi mereka (Ricklefs, 2010: 29-30).

Tidak ada sumber sejarah yang secara jelas menyebutkan kapan pertama kalinya orang-orang Bugis datang ke Banten. Diperkirakan mereka datang dalam rombongan besar ketika Banten menjadi kesultanan besar di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, mungkin bersamaan dengan masa ketika ulama terkemuka Sulawesi Selatan, Syaikh Yusuf mulai menetap di Banten di paruh pertama abad ke-17. Seorang penulis, Abu Hamid, berpendapat bahwa reputasi Syaikh Yusuf mampu menarik perhatian orang-orang dari luar Jawa, termasuk orang Bugis untuk menuntut ilmu agama kepadanya. Selain itu, merujuk kepada sumber-sumber Belanda, Hamid juga menyebutkan bahwa setelah Sultan Ageng Tirtayasa wafat, perang gerilya antara Kesultanan Banten dan VOC dilanjutkan oleh Syaikh Yusuf, Pangeran Purbaya dan Pangeran Kidul. Syaikh Yusuf memimpin kurang lebih 5.000 tentara, termasuk lebih dari 1.000 tentara yang berasal dari Makassar, Bugis dan Melayu. Penjelasan ini menunjukkan bahwa etnis Bugis dan juga Makassar

sudah banyak yang menetap di Banten dan menjadi tentara Kesultanan Banten serta berperang melawan VOC pada waktu itu (Hamid, 2005: 103).

Namun, dalam masa-masa sesudahnya tidak ada lagi catatan sejarah yang menyebutkan sepak-terjang orang Bugis di Banten. Sebuah penelitian terkini tentang etnis Bugis di Banten menyebutkan bahwa orang-orang Bugis yang kini menetap di Kampung Bugis, Kelurahan Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten pertama kali datang pada tahun 1965. Berdasarkan memori kolektif mereka, disebutkan bahwa pada mulanya hanya ada enam orang saja yang datang ke Banten, yaitu Aras, Gala, Siri, Made, Merali dan Bedu. Mereka datang ke Banten sebagai nelayan. Setelah merasa nyaman tinggal di sana, mereka mulai hidup menetap dan membawa serta sanak keluarga mereka. Menetapnya mereka di Banten menunjukkan kesesuaian dengan tradisi mereka bahwa jika ada suatu daerah yang dapat mendatangkan rezeki, mereka akan menetap dan tinggal selamanya di sana. Kedatangan orang-orang Bugis selanjutnya terjadi dalam beberapa gelombang, yaitu pada tahun 1972, 1974 dan 1975. Hingga kini, berdasarkan data dari kelurahan setempat, pada tahun 2013 tercatat populasi orang Bugis di Karangantu berjumlah 4.324 jiwa, terdiri dari 2.112 jiwa laki-laki dan 2.212 jiwa perempuan (Wazin dkk, 2015: 34-43).

Sama halnya dengan kedatangan orang Bugis ke Banten, kedatangan orang Lampung dan Orang Cirebon juga tidak terdokumentasi dengan baik. Walaupun pernah menjadi daerah koloni Banten dan merupakan salah satu daerah penghasil lada utama bagi Kesultanan Banten (Kartodirdjo, 1966: 112 & Tjandrasmita, 1981/1982: 323), sumber-sumber tertulis tentang hubungan Banten dan Lampung tidak banyak diketahui, terlebih lagi tentang keberadaan orang-orang Lampung di Banten, terutama di Karangantu. Kini sebagian besar orang Lampung di Banten menetap di Kampung Cikoneng, Kampung Bojong, Kampung Tegal dan Kampung Salatluhur di Desa Cikoneng, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Orang-orang Lampung di Banten ini bisa dikatakan memiliki identitas ganda. Salah satu

indikasinya adalah bahwa pada gerbang/gapura kantor Kepala Desa Cikoneng ada tulisan yang berbunyi “Kami orang Banten, kami menjunjung tinggi leluhur kami, Lampung”. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menyadari bahwa mereka beretnis Lampung, tetapi mereka bukan orang Lampung (secara geografis), karena mereka adalah orang Banten. Mereka pun menolak dikatakan sebagai pendatang (Musaddad dkk, 2015: 14 & 35).

Sementara itu, sejak awal berdirinya Kesultanan Banten, orang-orang Cirebon bersama-sama dengan orang-orang asing lainnya dari Gujarat, Mesir, Turki, dan Tiongkok memiliki perkampungan sendiri di sebelah barat Pasar Karangantu dan di sebelah barat Masjid Banten. Dalam tradisi Cirebon, peranan Sunan Gunung Jati sebagai pendiri Kesultanan Banten sangat menonjol. Selain itu, orang-orang Cirebon juga membantu Banten dalam menaklukkan Kerajaan Sunda pada tahun 1579. Pada masa Maulana Yusuf (1570-1580) perdagangan Banten sangat maju dan bahkan Banten dapat dianggap sebagai sebuah kota pelabuhan emporium tempat barang-barang dagangan dari berbagai penjuru dunia digudangkan dan kemudian didistribusikan. Situasi di Karangantu sangat ramai. Pedagang dari Tiongkok membawa barang dagangan berupa porselen, sutra, beludru, benang emas, jarum dan lain-lain. Pedagang Persia dan Arab menjual permata dan obat-obatan. Pedagang dari Gujarat menjual kain dari bahan kapas dan sutra. Sementara itu, pedagang Portugis membawa barang dagangan berupa kain dari India. Para pedagang dari Nusantara, seperti dari Cirebon, Makassar, Sumbawa, Palembang, Maluku dan lain-lain membawa barang dagangan dari daerahnya masing-masing, seperti garam, gula, beras, ikan kering, rempah-rempah dan lain-lain (Michrob dan Chudari, 1993: 82-83).

Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak lama Banten telah menjadi daerah kosmopolitan yang mempertemukan pedagang dari berbagai penjuru dunia untuk mengadu nasib di sana. Pada masa sekarang, pelabuhan Karangantu tidak lagi menjadi pelabuhan kosmopolitan seperti pada masa kesultanan. Namun, setelah

Indonesia merdeka, setidaknya orang-orang ‘asing’ dari berbagai daerah di Indonesia masih ada yang menetap dan bergantung sepenuhnya pada pelabuhan yang pernah sangat termasyhur pada abad ke-17 dan 18 tersebut. Bagaimana kondisinya kini pada masa desentralisasi yang seharusnya diharapkan pemberian otonomi daerah bagi Banten sebagai sebuah provinsi yang berdiri pada tahun 2000 dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi Pelabuhan Karangantu? Bagaimana pula dinamika antaretnis yang terjadi di sana yang kini tidak sekosmopolis pada masa Kesultanan Banten? Untuk menjawabnya, di bawah ini akan dijelaskan kondisi desentralisasi di Indonesia secara umum.

Kebijakan desentralisasi

Demokratisasi dan desentralisasi adalah dua proses yang terus berjalan dan berkembang di Indonesia. Keduanya muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan sentralisasi dan proses demokrasi yang tidak berfungsi dengan baik pada masa Orde Baru. Keduanya adalah konsep yang perlu dipahami dalam menjelaskan dinamika antaretnis di Karangantu. Edward Aspinall dan Greg Fealy menjelaskan aspek-aspek hubungan antara pusat dan daerah pada masa pasca Orde Baru dan menunjukkan bahwa kemunculan kekuatan lokal telah mempengaruhi seluruh aspek politik, ekonomi dan masyarakat Indonesia (2003: 2).

Proses desentralisasi di Indonesia tidaklah sama dengan proses demokratisasi. Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken menginvestigasi peranan elit daerah, terutama dalam bidang birokrasi, ekonomi, dan politik identitas pada masa pasca Suharto. Argumen utama dalam karya mereka adalah bahwa desentralisasi tidak serta-merta berujung pada demokratisasi, tata laksana pemerintahan yang baik dan penguatan masyarakat madani di tingkat daerah. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa yang lazim terjadi adalah desentralisasi korupsi, kolusi dan kekerasan politik yang dulunya hanya umum terjadi pada masa Orde Baru, dan sekarang dialihkan kepada pola-pola patrimonial di tingkat daerah (2007: 18).

Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, sebuah era desentralisasi menggantikan periode sentralisasi lama yang mengabaikan otonomi daerah. Menurut Schulte Nordholt dan Van Klinken, ciri khas identitas etnik dan keagamaan adalah sifat provinsi di Indonesia yang paling menonjol setelah runtuhnya Orde Baru. Etnisitas telah menjadi ideologi dalam perjuangan politik dan di saat yang bersamaan, ia juga telah membangkitkan perasaan yang mendalam (Schulte Nordholt & Van Klinken, 2007: 21).

Presiden Habibie menghasilkan dua undang-undang yang sangat penting dalam proses desentralisasi di Indonesia: UU No. 22/1999 yang berhubungan dengan pendelegasian kewenangan politik dan UU No. 25/1999 yang mengatur urusan keuangan yang menguntungkan daerah yang pada akhirnya memulai era baru desentralisasi yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001 (Schulte Nordholt & Van Klinken, 2007: 12 & Aspinall & Fealy, 2003: 3). Di bawah suasana politik baru, pemerintah pusat diharuskan menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam semua bidang, kecuali bidang hubungan luar negeri; pertahanan dan keamanan; kebijakan keuangan; hukum; dan agama (Aspinall & Fealy, 2003: 3-4 & Mietzner, 2010: 176).

Bupati dan walikota pada masa Orde Baru dipilih secara formal oleh DPRD II, sedangkan keputusan yang sebenarnya dibuat (direstui dalam retorika politik Indonesia) oleh pemerintah pusat. Ketika Orde Baru runtuh, pada mulanya DPRD II lah yang memilih bupati dan walikota. Namun, dalam perkembangan selanjutnya ketika pemilihan langsung diperkenalkan, rakyatlah yang memilih pemimpinnya. Kebijakan desentralisasi ini telah membuat 'putra daerah' memiliki peran penting dalam menduduki posisi birokrat yang strategis.

Kini telah hampir dua dekade Indonesia memasuki masa pasca Orde Baru, dan ada banyak perubahan dramatis dalam konstelasi politik Indonesia. Pada masa transfer kekuasaan tersebut, bangsa Indonesia telah berusaha memformulasikan

dan mengimplementasikan reformasi menyeluruh yang berusaha mendemokratisasikan dan memperbaiki sistem pemerintahan, sekaligus menyembuhkan luka-luka yang ditinggalkan oleh Orde Baru pada masyarakat di daerah yang sering termarginalisasi. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan desentralisasi fungsi pemerintahan. Ironisnya, ketika proses reformasi terus berjalan, sebuah “fitur patologis” pemerintahan sebelumnya, yaitu patronase, nampak telah menjadi karakter era pasca Orde Baru (Mackie, 2010: 82-83). Pola patronase tersebut tidaklah statis karena ia telah dipengaruhi oleh proses ‘*state-building*’ dan oleh hal yang sama, ia telah mempengaruhi proses tersebut. Dalam beberapa hal, patronase diwariskan dari Orde Baru, sedangkan akarnya dapat dilacak hingga masa pra-kolonial. Apa yang kita lihat di sini adalah sebuah ‘*changing continuity*’ (kesinambungan yang berubah) yang akan membantu menjelaskan masalah-masalah yang terhubung dengan desentralisasi dan pembentukan otonomi daerah (Schulte Nordholt, 2004: 30-31).

Pola dan bentuk hubungan antaretnis di Banten

Pada masa Orde Baru, rezim Suharto menegaskan pembagian etnis antara yang berkuasa dan yang dikuasai di Banten. Orang Sunda banyak memegang jabatan penting dalam bidang administratif dan juga militer, termasuk bupati, sekretaris daerah dan komandan militer. Namun, kebijakan pemerintah Orde Baru ini sebenarnya meniru kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mengangkat pejabat di Banten yang berasal dari luar Banten (Pribadi, 2008: 1).

Orang Bugis, Lampung dan Cirebon di Karangantu yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan masih mempertahankan adat-istiadat dan tradisi mereka. Mereka menyadari asal-usul mereka sebagai orang yang berasal dari luar Banten. Namun, setelah sekian lama menetap di Banten dan memiliki keturunan, mereka menganggap bahwa Banten adalah tempat tinggal mereka yang harus dijaga,

dipertahankan dan dijadikan sebagai pembentuk identitas mereka. Hal yang agak sedikit berbeda berlaku bagi orang Cirebon di mana hubungan dengan daerah asal mereka masih tetap dipertahankan secara intensif.

Gambaran Banten sebagai daerah dengan corak Islam yang kuat membuat orang Bugis, Lampung dan Cirebon mengidentifikasi diri mereka dengan kebudayaan Banten. Penerimaan syariat Islam menjadi salah satu bagian penting dalam *panngaderreng*, sistem kebudayaan Bugis yang menjadikan Islam sebagai salah satu simbol identitas penting kebudayaan Bugis. Dengan demikian tidaklah mengherankan jika orang Bugis pada umumnya menganggap bahwa secara normatif orang Bugis haruslah beragama Islam. Karena itu, jika ada orang Bugis yang tidak beragama Islam maka ia dianggap menyalahi kecenderungan umum, dan dianggap bukan lagi sebagai orang Bugis dalam arti yang sesungguhnya. Pandangan ini dipegang teguh secara umum di kalangan orang Bugis di Karangantu sebagai konsekuensi dari penerimaan syariah dan sebagai bagian integral dari *panngaderreng*. Oleh karena itu, agama non-Islam kurang berkembang di kalangan orang Bugis di manapun (Said dalam Wazin dkk, 2015: 3).

Bagi orang Bugis, adat menempati posisi sentral dalam kehidupan sehari-hari. Adat yang tercermin dalam kebiasaan hidup orang Bugis membentuk pandangan serta pola hidup sehari-hari yang mencakup proses-proses sosial seperti hubungan antarindividu dan kelompok, hak-hak dan kewajiban individu dalam masyarakat, pola-pola interaksi sosial, kepemimpinan dan lain sebagainya.

Dalam tradisi orang Bugis di Banten, orang yang sudah berhaji mendapatkan kedudukan yang terhormat di masyarakat, meskipun tampilan rumahnya sederhana. Hal tersebut dapat dilihat, misalnya, dalam upacara-upacara pernikahan di mana orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji berada di barisan paling depan. Selain itu, kebiasaan orang Bugis juga menempatkan perempuan yang belum menunaikan ibadah haji untuk mengurus makanan atau bertugas di dapur

pada acara pesta pernikahan. Oleh karena itu, ada kecenderungan bagi perempuan Bugis di Banten untuk segera menunaikan ibadah haji agar tidak lagi ditempatkan di dapur dalam upacara pernikahan (Wazin dkk, 2015: 52-53).

Selain dalam hal persamaan mata pencaharian sebagai nelayan, ada beberapa tradisi di kalangan orang Bugis di Banten yang seringkali berhubungan dengan orang Banten dan orang-orang dari etnis lainnya. Salah satunya adalah ritus siklus hidup sejak mengandung hingga melahirkan. Tidak seperti orang Banten, orang Bugis di Banten tidak melaksanakan tradisi tujuh bulanan (*nujubulan*) karena mereka menganggap hal tersebut tidak terlalu penting. Setelah melahirkan, sang anak biasanya akan diaqiqahkan, dan ini berarti sebuah pesta besar yang melibatkan banyak orang, tidak hanya dari etnis Bugis saja, melainkan dari etnis lain. Dalam ritus pernikahan, tidak sedikit orang Bugis yang menikah dengan etnis lainnya, terutama dengan orang Banten. Biasanya ketika ada pernikahan beda etnis, kedua belah pihak tidak terlalu mempermasalahkan tentang upacara adat pernikahan mana yang akan dilaksanakan. Dalam ritus kematian, berbeda dengan orang Banten, orang Bugis di Karangantu tidak melaksanakan tahlilan. Mereka hanya melaksanakan pengajian pada malam hari setiap sesudah magrib. Ada yang mengatakan bahwa pengajian tersebut dilakukan selama satu minggu dan harus hingga tamat membaca Quran. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa pengajian tersebut harus tamat membaca Quran tiap malamnya selama satu minggu (Wazin dkk, 2015: 135-145).

Sebagai penganut agama Islam, keberadaan orang Lampung di Banten juga sering menimbulkan interaksi sosial dengan orang Banten. Mayoritas orang Lampung di Banten menyekolahkan anak-anak mereka di madrasah atau pesantren di sekitar rumah mereka. Dalam perayaan Idul Fitri, Idul Adha dan perayaan hari-hari besar keagamaan Islam lainnya, orang Lampung sering mempertunjukkan kesenian mereka, seperti Tari Sembah. Orientasi ke daerah asal masih tetap ada, dan ditunjukkan melalui adanya komunitas Lampung Banten yang bernama

Lampung Say (Lampung Satu). Organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan orang Lampung dan untuk mempertahankan serta melestarikan adat dan tradisi orang Lampung dan orang Banten. Organisasi ini menunjukkan bahwa ada bentuk akulturasi yang kuat antara orang Lampung dan daerah di mana mereka tinggal. Selain itu, dalam hal bahasa sehari-hari, selain menggunakan bahasa Lampung, mayoritas orang Lampung di Banten juga menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Jawa ketika berkomunikasi dengan orang Banten (Musaddad dkk, 2015: 72-74).

Dalam beberapa ritus siklus hidup, seperti ritus kematian, orang Lampung juga seringkali berinteraksi dengan orang Banten. Tidak seperti orang Bugis yang tidak melaksanakan tahlilan, orang Lampung di Banten melaksanakan tahlilan dan *riungan* (kumpulan). Acara tahlilan tersebut biasanya dilaksanakan pada hari pertama hingga hari ketujuh dengan mengundang tetangga terdekat dari etnis manapun.

Sementara itu, adat-istiadat dan tradisi yang hampir sama antara orang Banten dan orang Cirebon membuat keduanya hampir tidak dapat dibedakan. Mayoritas orang Banten di Karangantu berbahasa Jawa dialek Serang, dan dialek ini juga hampir sama dengan bahasa Jawa dialek Cirebon yang dipraktikkan oleh orang Cirebon. Tidak seperti orang Bugis dan orang Lampung yang mungkin tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah leluhur mereka, orang Cirebon yang menjadi nelayan di Karangantu seringkali mengunjungi tanah leluhur mereka. Seringkali ketika mereka kembali lagi ke Banten, mereka membawa serta sanak saudara mereka untuk menjadi nelayan musiman di Karangantu. Keberadaan mereka yang mengelompok, sama dengan orang Bugis dan orang Lampung, sangat jelas menunjukkan bahwa mereka juga memperlihatkan identitas mereka. Namun, hal tersebut tidak lantas berarti bahwa mereka menunjukkan eksklusivitas mereka. Dalam banyak hal, orang Cirebon menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi terhadap adat dan tradisi orang Banten dengan salah satu indikasinya adalah pernikahan antara mereka dengan orang Banten.

Orang Bugis, Lampung maupun Cirebon yang sudah lama atau baru saja menetap di Karangantu memiliki sebuah tradisi bersama yang dilakukan dengan orang Banten pada waktu-waktu tertentu. Tradisi tersebut bukanlah tradisi ritus siklus hidup, melainkan tradisi ruwatan laut atau nadran. Tradisi ini mempersatukan komunitas nelayan yang ada di Karangantu. Nadran atau pesta laut diadakan setahun sekali dan diikuti oleh seluruh nelayan tanpa melihat perbedaan asal-usul. Acara ini adalah bentuk ucapan syukur atas hasil panen yang melimpah atau sebagai bentuk doa bersama agar para nelayan diberikan keselamatan ketika melaut. Latar belakang etnis yang berbeda dapat dikatakan tidak lagi menjadi perbedaan ketika acara ritual masyarakat maritim ini dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam kondisi khusus, ritual ini bahkan dapat dilaksanakan lebih dari setahun sekali, terutama ketika kondisi cuaca di laut sedang buruk dan oleh karena itu para nelayan membutuhkan perlindungan dari penguasa alam untuk keselamatan mereka.

Secara umum, hampir tidak pernah ada perselisihan besar yang mempertentangkan etnis-etnis yang mencari nafkah sebagai nelayan di Karangantu. Jikapun ada perselisihan, maka itu adalah perselisihan antarindividu, bukan perselisihan antaretnis. Dalam hal ini, dinamika antaretnis di Karangantu pada masa desentralisasi merefleksikan apa yang terjadi pada masa Kesultanan Banten ketika menjadi daerah kosmopolitan yang mempertemukan bangsa-bangsa dari berbagai penjuru dunia. Namun, tidak seperti pada masa kesultanan ketika Pelabuhan Karangantu adalah sebuah pelabuhan perdagangan besar, kini ia hanya menjadi tempat pelabuhan ikan dan menjadi kampung nelayan saja. Selain itu, kini tidak ada lagi kehadiran pedagang mancanegara yang membawa barang-barang dagangan dari seluruh dunia.

Kebijakan desentralisasi dan perkembangan dunia maritim Indonesia dan Banten

Hubungan antardaerah di Indonesia pasca diberlakukannya otonomi daerah memperlihatkan sisi yang berbeda dibandingkan pada masa Orde Baru. Pada masa kekuasaan Suharto, daerah diminta untuk mensukseskan program-program pembangunan pusat, dan oleh karena itu daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak diharapkan untuk saling bersaing. Namun, sejak era desentralisasi dimulai, dinamika hubungan antardaerah memasuki babak baru. Daerah diberikan kewenangan yang besar untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi dirinya sendiri untuk kepentingan daerah itu sendiri.

Namun, nampaknya pemerintah pusat tidak berkaca pada sejarah. Dalam pidato pengukuhan guru besar tetapnya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia pada tahun 2006, Susanto Zuhdi merujuk pada karya John Tucker tentang usaha pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam mempersatukan kepulauan dari Sabang sampai Merauke melalui kapal *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) yang berlayar dari ujung barat dan timur ke segenap penjuru wilayah yang disebut *Pax Neerlandica*.

Jika pemerintah kolonial begitu menganggap penting transportasi laut sebagai upaya menyatukan pulau-pulau di Nusantara, mengapa pemerintah Indonesia tidak? Justru dengan membiarkan pelayaran nasional dikuasai asing, pemerintah hanya akan melihat pada akhirnya kapal asing merajai angkutan laut Indonesia. Sebagaimana AB Lopian, “nahkoda” sejarawan maritim Asia Tenggara memandang konsep *archipelago* Indonesia dari pengertian dasarnya sebagai “laut yang ditaburi sekumpulan pulau”, maka pemerintah perlu melihat jika acuan lama bangsa Indonesia tentang *archipelago* tidak lagi merujuk kepada negara kepulauan, melainkan sebagai sebuah negara maritim.

Dengan cara pandang yang membuat laut adalah yang terpenting bagi Indonesia, maka dapat dipastikan cara pandang “daratan” akan tergantikan. Konsekuensi logisnya, laut dijadikan sebagai sebuah sistem. Ini membuat suatu jaringan yang mengintegrasikan pulau-pulau di Indonesia. Laut bukan lagi sebuah penghalang, tapi sebuah pemersatu, sehingga secara otomatis, pelayaran dan dunia maritim nasional akan bangkit kembali.

Hal tersebut mungkin dapat dihindari jika pemerintah pusat dan daerah berkaca pada Inggris atau bahkan Amerika Serikat yang berorientasi maritim dan mementingkan perdagangan ke daerah seberang laut. Amerika Serikat begitu tertarik dengan ide brilian Alfred Thayer Mahan (1840-1914) yang menulis tentang *The Influence of Sea Power upon History 1660-1783* (1890), sehingga pada akhir abad ke-19 mereka mulai membangun angkatan lautnya. Politik ekspansi menyeberangi lautan yang mulai dianut Amerika Serikat waktu itu dapat dicocokkan dengan teori kekuatan laut Mahan, sehingga pemerintah mendapat dukungan rakyat untuk melaksanakan politik ini. Bahkan, pengaruh Mahan ini berlanjut ke negara-negara lain. Di Jerman, Jepang, Prancis, Italia, Rusia, dan Spanyol terjadi dorongan yang kuat untuk membangun kekuatan lautnya.

Contoh lain berasal dari daerah di antara Eropa, Asia dan Afrika. Mediterranean adalah bukti kompleksitas laut. Ia bukanlah laut tunggal, *it is a complex of seas; and these seas are broken up by islands, interrupted by peninsulas, ringed by intricate coastlines*. Demikianlah yang dikatakan Fernand Braudel dalam pengantar bukunya yang terkenal itu, *The Mediterranean; and The Mediterranean World in the Age of Philip II* (1972). Kebudayaan Mediterranean begitu maju, termasuk tentunya kehidupan perekonomiannya, karena dianggap sebagai pemersatu tiga benua dan beberapa negara di sekitarnya, bukan dianggap sebagai penghalang yang memisahkan mereka.

Mungkin itu pula pandangan para pelaut Bugis yang lebih dulu menyentuh Australia sebelum James Cook, atau para pelaut Aceh yang sering “singgah” di India, sehingga dapat dikatakan sebagai penelusuran pelayaran masa lalu. Selain itu, menurut Azyumardi Azra (2003), kemakmuran kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, terutama sebagai hasil perdagangan internasional lewat laut, telah memberikan kesempatan kepada masyarakat Muslim Melayu untuk melakukan perjalanan ke pusat-pusat keilmuan dan keagamaan di Timur Tengah. Atau menurut Anthony Reid (1992) perkembangan kota-kota emporium Nusantara di pantai utara Jawa menduduki tempat penting dalam hubungan dengan perkembangan perekonomian Nusantara. Kota-kota pelabuhan tersebut telah berperan sebagai pelabuhan perantara internasional yang menghubungkan Jawa dan daerah produsen rempah-rempah di daerah Kepulauan Maluku yang ada di ujung timur Nusantara dan daerah Nusantara yang ada di ujung barat. Periode ini disebut oleh Reid sebagai masa “kurun niaga” Asia Tenggara.

Selain itu masih banyak contoh kejayaan masa lalu Indonesia yang berasal dari dunia maritim. Untuk hal tersebut, perlu ditanyakan bagaimana peranan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan yang ada di setiap daerah. Apakah konsep “pinggiran” dan “pusat” yang memandang laut sebagai pinggiran masih terus dijalankan, sehingga laut dan budaya maritimnya selalu terpinggirkan? Nampaknya ini yang tetap terjadi pada kebijakan dan sistem kelautan yang ada di Banten dan Indonesia secara umum. Di satu sisi, hubungan antaretnis di daerah pesisir Banten adalah hubungan sosial-ekonomi-budaya yang telah telah terjalin lama dan dapat dijadikan sebagai bentuk hubungan multikulturalisme yang ideal. Namun, di sisi lain kebijakan desentralisasi dan kebijakan pemerintah pusat dalam masalah kelautan dan perikanan belum mampu memberikan solusi yang tepat dalam meningkatkan kehidupan perekonomian dan memberdayakan masyarakat nelayan Banten, seperti yang terjadi pada abad ke-16 dan 17.

Walaupun kini Pelabuhan Karangantu tidak lagi menjadi pelabuhan besar seperti pada masa Kesultanan Banten, tetapi pelabuhan ini masih tetap menjadi *melting pot* bagi beberapa etnis Nusantara. Keberadaan orang Bugis, Lampung dan Cirebon yang berinteraksi dengan sesamanya dan dengan masyarakat setempat menunjukkan bahwa Pelabuhan Karangantu masih tetap menarik perhatian orang-orang dari luar Banten untuk mencari nafkah di sana. Ini adalah sebuah kondisi yang sejatinya dapat membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah merumuskan kebijakan bersama tentang pentingnya pelabuhan ini, tidak hanya bagi perekonomian Banten dan Indonesia, tetapi juga sebagai sebuah penanda eksistensi keberagaman budaya Nusantara. Kebijakan desentralisasi sesudah tahun 2000 juga adalah sebuah keuntungan bagi pemerintah daerah untuk lebih serius memikirkan dan merumuskan kebijakan yang dapat merevitalisasi Pelabuhan Karangantu menjadi pelabuhan kosmopolis seperti pada masa kesultanan.

Pengembangan masyarakat Muslim di daerah pesisir Banten utara

Masyarakat nelayan di Karangantu adalah masyarakat yang majemuk. Keberadaan etnis-etnis yang berbeda dari beberapa daerah di Indonesia merefleksikan apa yang terjadi pada masa Kesultanan Banten pada masa jayanya. Namun kini bagaimana keadaannya pada masa desentralisasi?

Dalam rangka mengantisipasi penyelenggaraan otonomi daerah yang mandiri dan bertanggung jawab, maka diperlukan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mendayagunakan secara efektif kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, pengembangan masyarakat pantai merupakan bagian integral dari pengelolaan sumber pesisir dan laut bagi kemakmuran masyarakatnya, sehingga perlu digunakan suatu pendekatan di mana masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek pembangunan.

Sementara, ketertinggalan dalam strategi pengembangan masyarakat pantai, tidak hanya dilihat sebagai masalah sosial dan budaya sehingga perlu perubahan ekstrem dalam sistem sosial atau nilai-nilai budaya, melainkan lebih sebagai masalah integral. Oleh karena itu, penyelesaiannya perlu dilakukan melalui strategi yang komprehensif dengan menempatkan sistem sosial-ekonomi dan nilai budaya yang sudah melekat di dalam masyarakat sebagai faktor pendorong perubahan. Selain itu, peningkatan produktivitas masyarakat pantai lebih menjadi sasaran dalam proses pembangunan guna memajukan kesejahteraan serta menyongsong kemandirian daerah secara berkelanjutan. Perkembangan ini pada muaranya akan meningkatkan harkat sumber daya manusia, kualitas dan sistem atau pranata sosial masyarakat.

Pemerintah Indonesia masih dapat merencanakan sekaligus mengimplementasikan kebijakan publik yang terkait dengan masalah pesisir dan kelautan. Meskipun baru dimulai, adanya perubahan arah pembangunan ke sektor kelautan, tetapi hal tersebut merupakan angin segar bagi masyarakat pantai yang selama ini kurang tersentuh dan seakan di-anaktir-kan dibandingkan wilayah ataupun sektor lainnya. Meskipun diakui, masuknya revolusi biru selama ini telah mengakibatkan banyak perubahan positif bagi kehidupan nelayan dan meningkatnya jumlah tangkapan ikan, membaiknya sistem bagi hasil dibanding sebelumnya dan telah meningkatkan pendapatan nelayan serta perubahan-perubahan dalam hubungan kerja, tetapi kondisi masyarakat pantai pada umumnya masih jauh tertinggal, baik dari tingkat pendapatan maupun dari tingkat pendidikan. Kondisi ini sangat menyulitkan dalam proses transformasi struktural masyarakat pantai (nelayan) ke arah kondisi yang lebih baik.

Penguatan perekonomian masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan keadaan perekonomian di dalam masyarakat yang berimbang, berkemajuan, dan berkeadilan. Dalam rangka menumbuhkan hal tersebut berbagai usaha yang berbasis masyarakat akan selalu dikembangkan agar keadaan

masyarakatpun juga semakin tangguh. Dalam rangka hal tersebut banyak cara yang bisa ditempuh oleh masyarakat, salah satunya adalah meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Masyarakat nelayan Karangantu memang secara umum tidak berada dalam keadaan yang sejahtera secara perekonomian jika dibandingkan dengan masyarakat kelas menengah yang mulai tumbuh di Banten. Hal tersebut terjadi karena implikasi dari tidak adanya prioritas kebijakan pembangunan perikanan yang mengakibatkan sangat minimnya prasarana perikanan di wilayah pesisir, terjadinya abrasi wilayah pesisir dan pantai, pengrusakan ekosistem laut dan terumbu karang, serta belum teroptimalkannya pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan. Implikasi langsung terhadap peningkatan pertumbuhan penduduk adalah makin meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup, sementara potensi sumber daya alam di darat yang dimiliki sangatlah terbatas. Hal tersebut mendorong banyak pihak untuk mengalihkan alternatif potensi sumber daya alam lain yang dimiliki yaitu potensi kelautan. Namun, secara sosial-budaya, masyarakat nelayan Karangantu sudah mampu memberdayakan diri mereka sendiri dengan mempertahankan kekuatan multikulturalisme yang diperlihatkan oleh keberagaman budaya dan bagaimana mereka dapat hidup berdampingan serta mempertahankan keberagaman tersebut. Hal ini tentu saja dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia yang sedang sama-sama membangun daerahnya di era otonomi daerah ini.

Penutup

Peninggalan sejarah berupa bangunan-bangunan besar dapat dengan mudah ditemui dan dikenal dengan baik oleh orang Banten. Situs Banten Lama atau bahkan Banten Girang tidaklah asing bagi orang Banten. Orang dari luar Banten pun banyak yang mengenalnya. Keraton, masjid, benda pusaka, tradisi, dan juga

kepercayaan yang ada pada orang Banten adalah bukti bahwa Banten tidak bisa lepas dari sejarahnya dan menjadi bagian yang integral dari sejarah nasional Indonesia.

Orang Banten biasa hidup dengan tradisi dan tradisi mungkin merasa bersyukur karena di Banten hal itu dipelihara dengan baik, bahkan bagi sebagian orang, dijadikan pedoman hidup. Terlepas dari sinkretisme atau mungkin hal-hal yang berada di luar jangkauan manusia, tradisi telah menemukan tempatnya di Banten dan dapat hidup hingga kini. Namun, upaya untuk menghadirkan kearifan masa lalu tampaknya belum bergeser dari wacana romantisme. Pemerintah daerah belum mampu menguak masa lalu itu sendiri menjadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat.

Banten yang pernah menjadi daerah kosmopolitan hingga kini sebenarnya masih memperlihatkan ciri tersebut. Keberadaan orang Bugis, Lampung dan Cirebon di Karangantu memperlihatkan bahwa tradisi multikulturalisme masih dapat ditemukan di Banten. Namun, keberadaan mereka di Banten seringkali tidak dapat berkontribusi secara positif dalam pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor penyebabnya sudah dijelaskan di atas. Namun, yang juga perlu diingat adalah faktor sejarah. Sejarah tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi saja atau diinterpretasi secara tunggal. Sejarah itu untuk suatu kepentingan, tetapi bukan untuk membenaran atau legitimasi rezim siapa atau kelompok mana, melainkan untuk bangsa Indonesia. Sejarah harus menjadi alat untuk mereorientasi sistem kelautan Indonesia dan jalan untuk membangun kembali budaya maritim, sehingga unsur-unsur yang bermata pencaharian hidup dan masyarakat pendukung budaya maritim akan kembali menemukan kejayaannya. Selain itu, dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat pesisir, tujuan jangka panjang pembangunan hanya mungkin dicapai bila disusun dan ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan kawasan pesisir dan laut secara mantap dan berkesinambungan. Akhirnya, semua kembali pada pemerintah dan para

pengambil kebijakan. Apakah laut dan pesisir dengan segala bentuk kehidupan serta keanekaragamannya benar-benar dikelola secara profesional dengan melandaskan pada prinsip-prinsip peningkatan kapasitas masyarakat lokal, ataukah hanya dijadikan sebagai komoditas politik yang dangkal dengan tujuan sesaat tanpa adanya keinginan dan komitmen kuat untuk mengelola sumberdaya kelautan secara berkelanjutan?

Bibliografi

- Aspinall, Edward and Greg Fealy. "Introduction: Decentralisation, Democratisation and the Rise of the Local". In *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, edited by Edward Aspinall and Greg Fealy. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Atsushi, Ota. *Changes of Regime and Social Dynamics in West Java: Society, State and the Outer World of Banten 1750-1830*. Leiden and Boston: Brill, 2006.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Braudel, Fernand. *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II*. New York City: Harper Collins, 1972.
- Hamid, Abu. *Syaikh Yusuf: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Kartodirdjo, Sartono. *The Peasants' Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course, and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966.
- Lubis, Nina. *Banten dalam Lintasan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. Jakarta: LP3ES, 2004.
- Mackie, Jamie. "Patrimonialism: The New Order and Beyond". In *Soeharto's New Order and Its Legacy: Essays in Honour of Harold Crouch*, edited by Edward Aspinall and Greg Fealy. Canberra, ANU E Press, 2010.
- Mahan, Alfred Thayer. *The Influence of Sea Power upon History: 1660-1783*. New York City: Little, Brown and Co., 1890.
- Meilink-Roelofsz, M.A.P. *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1600*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1962.
- Michrob, Halwany and Mudjahid Chudari. *Catatan Masalalu Banten*. Serang: Saudara, 1993.
- Mietzner, Marcus. "Indonesia's Direct Elections: Empowering the Electorate or Entrenching the New Order Oligarchy". In *Soeharto's New Order and its Legacy*, edited by Edward Aspinall and Greg Fealy. Canberra, ANU E Press, 2010.
- Musaddad, Endad dkk. *Etnis Lampung di Banten*. Serang: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015.

- Pribadi, Yanwar. "Jawara in Banten: Their Socio-Political Roles in the New Order Era 1966-1998", M.A. thesis, Leiden University, 2008.
- Reid, Anthony. *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi, 2010.
- Schulte Nordholt, Henk. "Decentralisation in Indonesia: Less State, More Democracy?" In *Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation*, edited by John Harriss, Kristian Stokke, and Olle Törnquist. Basingstoke [etc.]: Palgrave Macmillan, 2004.
- Schulte Nordholt, Henk and Gerry van Klinken. "Introduction". In *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*, edited by Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken. Leiden: KITLV Press, 2007.
- Suharto. *Banten dalam Masa Revolusi 1945-1949: Proses Integrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Ph.D. Thesis, Universitas Indonesia, 2001.
- Tjandrasasmita. *Sultan Ageng Tirtayasa*. Jakarta: Depdikbud, 1981/1982.
- Untoro, Heriyanti O. *Kebesaran dan Tragedi Kota Banten*. Jakarta: Yayasan Kota Kita, 2006.
- Wazin dkk. *Etnis Bugis di Banten: Kajian tentang Orang Bugis di Kampung Bugis Karangantu*. Serang: LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015.
- Wessing, Robert. "The Position of the Baduj in the Larger West Javanese Society", *Man*, New Series, Vol. 12, No. 2, August 1977.
- Williams, Michael. *Communism, Religion and Revolt in Banten*. Athens: Ohio University Center for International Studies, 1990.
- Zuhdi, Susanto. *Perspektif Tanah-Air dalam Sejarah Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap FIB UI. Depok: UI, 2006.